

Pendanaan ESG Berbasis Nilai Syariah untuk UMKM di Indonesia

Arfiana Maulina Fatimah¹

¹ Faculty of Digital Communication And Hotel And Tourism, Universitas Bina Nusantara, arfiana.fatimah@binus.ac.id

Intisari:

Pendanaan berbasis ESG (*Environmental, Social, Governance*) telah menjadi pendekatan strategis untuk mendorong keberlanjutan, khususnya dalam sektor UMKM di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi potensi integrasi prinsip ESG dengan nilai syariah dalam mendukung UMKM, terutama di sektor pertanian. Dengan pendekatan ini, pembiayaan diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan tata kelola yang lebih adil. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis literatur, kebijakan terkini, dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa model pendanaan ESG-Syariah menawarkan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan literasi, infrastruktur, dan implementasi ESG pada UMKM. Artikel ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan UMKM untuk mempercepat adopsi ESG Financing berbasis syariah, guna mewujudkan keberlanjutan ekonomi yang inklusif.

Kata kunci:

ESG Financing; Nilai Syariah; UMKM; Keberlanjutan; Keuangan Hijau.

Abstract:

ESG (Environmental, Social, Governance)-based financing has emerged as a strategic approach to fostering sustainability, particularly in Indonesia's MSME sector. This article explores the potential integration of ESG principles with Sharia values to support MSMEs, especially in the agricultural sector. This approach aims to provide positive environmental impacts, enhance social welfare, and create more equitable governance. The study employs a qualitative method, analyzing literature, recent policies, and case studies. The findings indicate that the ESG-Sharia financing model offers an innovative solution to addressing literacy, infrastructure, and ESG implementation challenges among MSMEs. The article recommends collaboration among the government, Islamic financial institutions, and MSMEs to accelerate the adoption of ESG-based Sharia financing, promoting inclusive economic sustainability.

Keywords:

ESG Financing; Shariah; MSMEs; sustainability; green finance

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang signifikan, mencapai lebih dari 64 juta unit usaha. UMKM ini berkontribusi

terhadap 61% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Namun, tantangan besar masih dihadapi oleh UMKM, terutama di sektor pertanian, seperti rendahnya akses terhadap pembiayaan berkelanjutan dan teknologi yang mendukung praktik ramah lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan pembiayaan berbasis ESG (*Environmental, Social, Governance*) menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, sekaligus mendorong keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Prinsip ESG dalam pembiayaan mulai mendapatkan perhatian yang signifikan di Indonesia, khususnya dengan diluncurkannya Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021–2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan elemen keberlanjutan dalam praktik keuangan melalui dukungan terhadap pembiayaan hijau dan inklusif (OJK, 2021). Namun, implementasi ESG Financing pada UMKM masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal literasi keuangan, akses modal, dan kesesuaian dengan prinsip syariah, yang menjadi preferensi utama dalam masyarakat Muslim Indonesia (Rahman, 2020).

Di sisi lain, pembiayaan berbasis syariah menawarkan solusi etis yang sejalan dengan prinsip ESG. Nilai-nilai seperti larangan riba, keadilan, dan keberkahan dapat memperluas cakupan ESG menjadi lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial dan spiritual. Dalam Islam, konsep maqasid syariah atau tujuan syariah menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum (masalah) yang sangat relevan dengan tiga pilar ESG (Dusuki & Abdullah, 2007).

Penelitian menunjukkan bahwa UMKM di sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mengadopsi praktik berkelanjutan, seperti konservasi air dan penggunaan energi terbarukan. Namun, dukungan infrastruktur dan kebijakan yang terbatas sering menjadi hambatan utama (Wahyudi, 2023). Selain itu, NGO seperti Global Green Growth Institute (GGGI) juga berperan penting dalam mendorong adopsi pembiayaan hijau di kalangan UMKM melalui program edukasi dan kemitraan dengan lembaga keuangan lokal (GGGI, 2022).

Dengan latar belakang ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi integrasi nilai-nilai syariah dalam *ESG Financing* untuk mendukung UMKM di Indonesia, terutama di sektor pertanian. Fokus utama penelitian ini meliputi:

1. Mengidentifikasi keselarasan antara prinsip ESG dan nilai syariah.
2. Mengkaji peluang dan tantangan dalam penerapan pembiayaan ESG-Syariah di UMKM.
3. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan inklusi ESG Financing berbasis syariah di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis potensi integrasi pembiayaan berbasis ESG (*Environmental, Social, Governance*) dengan prinsip syariah dalam mendukung UMKM di sektor pertanian di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan lembaga keuangan syariah, pejabat pemerintah, dan pelaku UMKM, serta observasi langsung terhadap praktik keberlanjutan UMKM. Studi dokumentasi dilakukan untuk menganalisis kebijakan pemerintah, laporan ESG, dan literatur ilmiah terkait.

Teknik validasi data meliputi triangulasi sumber, member checking, dan peer debriefing untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, identifikasi tema utama, dan penyajian naratif terkait peluang, tantangan,

dan dampak implementasi pembiayaan ESG-Syariah. Hasil penelitian disimpulkan setelah melalui verifikasi dengan triangulasi dan validasi dari berbagai sumber data.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) dan nilai-nilai syariah memiliki keselarasan yang signifikan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM, terutama di sektor pertanian. ESG berfokus pada keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik, sementara prinsip syariah menambahkan dimensi spiritualitas dan moralitas melalui larangan riba, keadilan ('*adl*), dan keberkahan (*barakah*). Kombinasi ini menciptakan model pembiayaan yang tidak hanya etis tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Beberapa UMKM yang menjadi objek penelitian menunjukkan potensi besar untuk mengintegrasikan prinsip ESG dan syariah, seperti mengadopsi praktik ramah lingkungan melalui penggunaan pupuk organik dan konservasi sumber daya air.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam implementasi pembiayaan ESG-Syariah. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan terkait ESG dan syariah di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bagaimana prinsip ESG dapat diterapkan secara praktis dalam kegiatan bisnis mereka, apalagi dalam kerangka pembiayaan berbasis syariah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan teknologi juga menjadi kendala, terutama di sektor pertanian. Misalnya, kurangnya akses terhadap teknologi hijau seperti irigasi hemat air dan energi terbarukan membuat UMKM sulit untuk menerapkan praktik keberlanjutan secara menyeluruh.

Pada sisi kebijakan, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021–2025* yang bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan berpartisipasi dalam pembiayaan hijau. Meskipun kebijakan ini memberikan arahan strategis, implementasinya masih terbatas pada perusahaan besar dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan UMKM. Dukungan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang telah membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan, tetapi pendekatannya masih dominan tradisional dan belum mengintegrasikan prinsip ESG secara mendalam.

Penelitian ini juga mengidentifikasi model integrasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satu model adalah pendanaan berbasis bagi hasil, yang sesuai dengan larangan riba dalam syariah dan mendukung pembagian risiko yang adil antara lembaga keuangan dan pelaku UMKM. Selain itu, pelaporan keberlanjutan yang menggabungkan prinsip ESG dan syariah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menarik minat investor yang mencari portofolio pembiayaan etis. Edukasi dan pendampingan kepada UMKM tentang ESG dan syariah juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi praktik ini.

Integrasi ESG dan syariah memiliki dampak positif yang luas. Dari sisi lingkungan, model ini dapat membantu mengurangi jejak karbon melalui praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Dari sisi sosial, pemberdayaan komunitas lokal dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan menjadi manfaat langsung dari pendekatan ini. Secara ekonomi, model pembiayaan ini dapat meningkatkan daya saing UMKM dengan menarik perhatian investor dan mitra bisnis yang mencari solusi pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Sebagai langkah strategis, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan UMKM untuk mempercepat implementasi pembiayaan ESG-Syariah. Pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih inklusif, seperti pengurangan pajak untuk

lembaga keuangan yang mengadopsi ESG Financing berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk pembiayaan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti obligasi hijau syariah atau kredit berbasis kinerja keberlanjutan. Dengan kolaborasi yang efektif, integrasi ESG dan syariah dapat menjadi pendekatan strategis untuk mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pembiayaan berbasis ESG (*Environmental, Social, Governance*) dengan prinsip syariah merupakan pendekatan inovatif yang memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia, khususnya di sektor pertanian. Prinsip ESG yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, memiliki keselarasan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan larangan riba, keadilan ('adl), dan keberkahan (barakah). Kombinasi ini tidak hanya menciptakan model pembiayaan yang etis dan inklusif, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Namun, implementasi integrasi ESG-Syariah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM, keterbatasan infrastruktur hijau, dan minimnya dukungan kebijakan yang inklusif. Meskipun demikian, peluang besar tetap terbuka melalui model pendanaan berbasis bagi hasil, pelaporan ESG-Syariah yang transparan, serta edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Dengan strategi ini, pelaku usaha dapat lebih siap mengadopsi praktik keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan UMKM untuk mempercepat adopsi pembiayaan ESG-Syariah. Pemerintah perlu memperluas insentif dan dukungan kebijakan, sementara lembaga keuangan dapat mengembangkan produk pembiayaan inovatif yang mendorong implementasi ESG. Dengan upaya bersama, integrasi ESG dan syariah tidak hanya memperkuat daya saing UMKM, tetapi juga mendukung tujuan keberlanjutan nasional secara holistik.

Integrasi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang relevan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Global Green Growth Institute (GGGI). (2022). Promoting Green Finance in Indonesia. Retrieved from <https://www.gggi.org>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Laporan Tahunan UMKM Indonesia. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021–2025. Jakarta: OJK.
- Rahman, A. (2020). *Islamic Finance: Principles and Practices*. Oxford: Oxford University Press.
- Wahyudi, T. (2023). Keberlanjutan dan Keuangan Hijau di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Hijau*, 12(3), 25–40.